



# **RENCANA KERJA ( RENJA )**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**TAHUN 2026**

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat Nya maka Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026 dapat tersusun sebagai dokumen perencanaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 dan Penyesuaian Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan yang mulai diberlakukan pada tanggal 12 Agustus 2024, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah merupakan salah satu unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan sehingga mempunyai tanggung jawab dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dengan mempertimbangkan skala prioritas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah dalam penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan memuat materi pokok dari sasaran strategis, program, kegiatan, indikator kinerja dan sasaran serta anggaran yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu Tahun Anggaran 2026, dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi agar lebih terarah.

Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SOPD lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Semoga Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Buntok, 2 Januari 2026

Plt. KEPALA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,



**AEP SADIKIN. SE., MM**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690505 200501 1 026

# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
Bab I PENDAHULUAN ..	4
A. Gambaran Umum.....	4
B. Struktur Organisasi .....	7
C. Dasar Hukum .....	10
Bab II TUJUAN DAN SASARAN .....	11
A. Tujuan.....	11
B. Sasaran.....	11
Bab III ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS. ....	6
A. Arah Kebijakan .....	12
B. Program dan Kegiatan Tahun 2026.....	13
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2026 .....	16
Bab IV PENUTUP .....	17
LAMPIRAN .....	18

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan dan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan yang mulai diberlakukan pada tanggal 12 Agustus 2024 maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan menjadi 2(dua) Lembaga terpisah yaitu : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah merupakan salah satu unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dengan mempertimbangkan skala prioritas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah dalam penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **1. Tugas, Fungsi dan Struktur BPKAD**

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

### **1.2 Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **1.3 Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan.

### **1.4 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut :**

Kepala Badan membawahi Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, yaitu:

1. Sekretariat
2. Bidang Anggaran
3. Bidang Perbendaharaan
4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
5. Bidang Aset Daerah

Kelompok Jabatan Fungsional

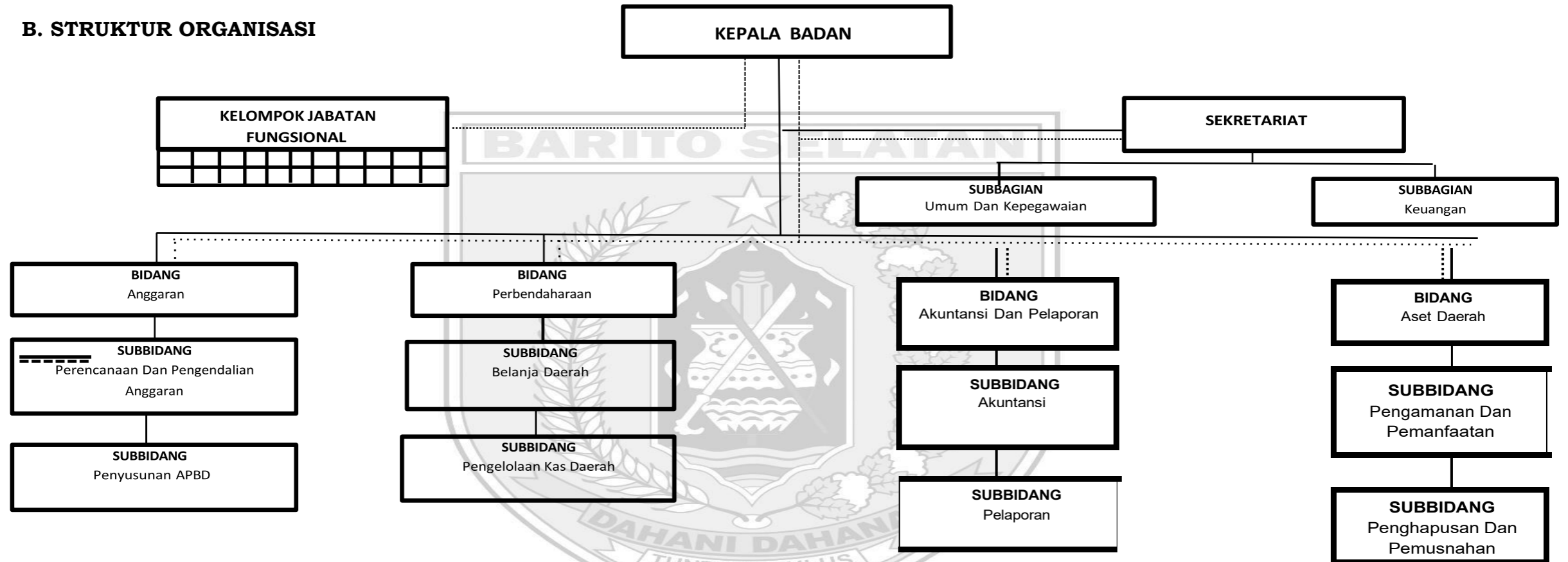
Sekretariat dan Bidang membawahi :

1. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:
  - a. Subbagian Umum; dan
  - b. Subbagian Keuangan.
2. Bidang Anggaran membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu:
  - a. Subbidang Perencanaan dan Pengendalian Anggaran; dan
  - b. Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Bidang Perbendaharaan membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu:

- a. Subbidang Belanja Daerah; dan
  - b. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah.
4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu:
    - a. Subbidang Akuntansi; dan
    - b. Subbidang Pelaporan.
  5. Bidang Aset Daerah membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu:
    - a. Subbidang Pengamanan dan Pemanfaatan; dan
    - b. Subbidang Penghapusan dan Pemusnahan
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.

# STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

## B. STRUKTUR ORGANISASI



Keterangan :

- : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi Administratif

## 2. Sumber Daya BPKAD

Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas. BPKAD Kabupaten Barito Selatan memiliki jumlah aparatur sebanyak 101 yang terdiri dari 35 orang PNS, 27 orang PPPK dan 39 orang Tekon.

Susunan kepegawaian dan kelengkapan merupakan gambaran formasi dan sarana prasarana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.1.1**  
**Jumlah dan Komposisi Pegawai pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan Berdasarkan Klasifikasi Tahun 2026**

No	Unit Kerja	Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kepala Subbidang	JFT	JFU	P3K	Tekon	Jumlah
1	Kepala	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	-	2	1	4	8	22	38
3	Bidang Anggaran	-	-	1	1	-	3	6	5	16
4	Bidang Perbendaharaan	-	-	1	2	-	3	4	4	14
5	Bidang Aklap	-	-	1	2	1	2	2	4	12
6	Bidang Aset	-	-	1	2	1	5	7	2	18
	Jumlah	1	1	4	9	3	17	27	37	99

Keadaan Pegawai menurut golongan jumlah Pegawai BPKAD Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :

**Tabel. 2.1.2**  
**Jumlah dan Komposisi PNS dan PPPK pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan Berdasarkan golongan Tahun 2026**

No	UNIT KERJA	GOLONGAN PNS				GOLONGAN PPPK		JUMLAH
		IV	III	II	I	V	IX	
1	Kepala	1	-	-	-			1
2	Sekretariat	1	6	-	-	6	2	15
3	Bidang Anggaran	-	5	-	-	3	3	11
4	Bidang Perbendaharaan	-	6	-	-	1	3	10
7	Bidang Aklap	1	4	-	-	1	2	8
8	Bidang Aset	1	6	1	-	3	3	14
9	Pejabat Fungsional	-	3	-	-	-	-	3
	Jumlah	4	30	1	-	14	13	62

Jumlah Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan menurut Tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut :

**Tabel. 2.1.3**  
**Jumlah dan Komposisi**  
**PNS dan PPPK pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan**  
**Berdasarkan Pendidikan Tahun 2026**

No	UNIT KERJA	PENDIDIKAN PNS						PENDIDIKAN PPPK		JUMLAH
		S-2	S-1	D III	SLTA	SLTP	SD	S-1	SLTA	
1	Kepala	1	-	-	-	-	-			1
2	Sekretariat	1	3	-	3	-	-	6	2	15
3	Bidang Anggaran	1	1	2	1	-	-	3	3	11
4	Bidang Perbendaharaan	2	3	1	-	-	-	1	3	10
5	Bidang Aklap	1	3	-	1	-	-	1	2	8
6	Bidang Aset	1	4	1	2	-	-	3	3	14
7	Pejabat Fungsional	1	2	-	-	-	-			3
	Jumlah	8	16	4	7	-	-	14	13	62

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada BPKAD menurut Diklat penjenjangan :

- a. ADUM : - Orang
- b. ADUMLA : - Orang
- c. SPAMA : - Orang
- d. SPAMEN : - Orang
- e. Diklat Pim Tk II : 1 Orang
- f. Diklat Pim Tk III : 3 Orang
- g. Diklat Pim Tk IV : 5 Orang

#### 4. Sarana dan Prasarana.

Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dalam Daftar Inventaris dibawah ini :

NO.	URAIAN	JUMLAH	
1.	Meja Kerja	106	Unit
2.	Kursi Kerja	231	Unit

3.	Lemari	231	Unit
4.	Laptop/Komputer	31	Unit
5.	Printer	126	Unit
6.	A.C Pendingin	55	Unit
7.	Gedung BPKAD	4	Unit

### **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta data kerja Perangkat Daerah.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan Sasaran Renja (Rencana kerja) adalah bagian penting dalam perencanaan pembangunan instansi pemerintah sesuai Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 – 2029.

#### **A. TUJUAN**

Tujuan adalah **“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang transparan dan akuntabel”**.

#### **B. SASARAN**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu merupakan sesuatu yang dihasilkan atau dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam jangka waktu satu tahun. Sasaran yang ditetapkan adalah : **“Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal”**.

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS**

#### **A. ARAH KEBIJAKAN**

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu pelaksanaan RPD. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk memberi arah pembangunan tahunan pada RPD di buat Fokus Tema Pembangunan Kabupaten Barito Selatan, untuk masing-masing Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Tema Pembangunan pada Tahun 2025 adalah : **“Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk pemerataan pendapatan, pengantasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas”**.

1. Mengelola penerimaan keuangan daerah yang didasarkan pada prinsip ekonomi, efisien dan efektif;
2. Menggali potensi pendapatan daerah yang tidak mempunyai efek negatif terhadap kesejahteraan masyarakat;
3. Mendorong dan mengembangkan kapasitas organisasi pemerintah daerah yang didasari oleh prinsip efisiensi dan efektifitas, atau dengan kata lain miskin struktur namun kaya fungsi;
4. Memperkuat terlaksananya prinsip akuntabilitas dalam seluruh siklus kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pada semua tatanan struktur dan teknis fungsional Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabuapten Barito Selatan;
6. Memperkuat/meningkatkan penyebaran informasi kebijakan daerah kepada masyarakat tentang pajak dan retribusi daerah;

7. Memperkuat basis hukum pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam berbagai bidang pembangunan yang memiliki keterkaitan dengan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

## B. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026

Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disertai dengan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 maupun untuk pemenuhan layanan Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah

KODE	URAIAN	PAGU MURNI	KET
1	2	3	4
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	140.476.934.780,06	
5.02	KEUANGAN	140.476.934.780,06	
5,02,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp57.838.343.640,06	
5,02,01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp305.128.500,00	
5.02.01.2.02.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp55.492.100,00	
5.02.01.2.02.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp55.000.000,00	
5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp55.000.200,00	
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp55.000.200,00	
5.02.01.2.02.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp84.636.000,00	
5,02,01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp35.924.062.021,06	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp35.437.062.021,06	
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp197.400.200,00	
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp177.353.000,00	
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp112.246.800,00	
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp244.800.000,00	
5.02.01.2.030003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Rp244.800.000,00	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp4.266.292.000,00	
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp3.999.800.000,00	

5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp254.000.000,00	
5.02.01.2.05.0005	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp12.492.000,00	
<b>5.2.1.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Rp724.506.920,00	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp44.192.000,00	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp82.218.500,00	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp99.500.500,00	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp60.205.800,00	
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp258.390.000,00	
5.02.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp80.000.000,00	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp100.000.120,00	
<b>5.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Rp14.912.081.999,00	
5.02.01.2.07.0002.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp6.345.967.000,00	
5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp5.542.878.999,00	
5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp3.023.236.000,00	
<b>5.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Rp1.228.040.200,00	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp99.010.900,00	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp977.729.300,00	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp151.300.000,00	
<b>5.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Rp64.160.000,00	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp15.000.000,00	
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp49.160.000,00	
<b>5.2.1.2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	Rp169.272.000,00	
5.02.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp84.636.000,00	
5.02.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp84.636.000,00	
<b>5.02.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Rp80.557.168.240,00	
<b>5.02.02.2.01</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	Rp2.871.959.240,00	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp133.500.000,00	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp199.520.000,00	
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Rp195.473.250,00	
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Rp174.568.000,00	
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Rp310.228.250,00	
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Rp201.908.800,00	
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rp286.745.500,00	
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp254.657.500,00	
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Rp147.686.940,00	

5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Rp292.471.000,00	
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp675.200.000,00	
<b>5.02.02.2.02</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	Rp1.376.123.000,00	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Rp426.796.000,00	
5.02.02.2.02.0002	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Rp10.166.000,00	
5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Rp95.664.000,00	
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Rp39.000.000,00	
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Rp51.667.000,00	
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Rp60.202.000,00	
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rp182.990.500,00	
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Rp110.774.500,00	
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp398.863.000,00	
<b>5.02.02.2.03</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	Rp2.072.000.000,00	
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Rp256.853.800,00	
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Rp554.949.000,00	
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Rp309.829.500,00	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp455.725.000,00	
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rp278.931.300,00	
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rp51.873.900,00	
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp163.837.500,00	
<b>5.02.02.2.04</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Rp74.237.086.000,00	
5.02.02.2.04.0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Rp2.500.000.000,00	
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Rp66.737.086.000,00	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Rp5.000.000.000,00	

<b>5.02.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Rp2.081.422.900,00	
<b>5.02.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	Rp2.081.422.900,00	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Rp184.764.800,00	
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp213.922.500,00	
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp348.723.600,00	
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp249.999.000,00	
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Rp134.200.000,00	
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp265.434.000,00	
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Rp199.990.000,00	
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp300.784.000,00	
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp183.605.000,00	
<b>J U M L A H</b>		<b>140.476.934.780,06</b>	

### **C. Perjanjian Kinerja Tahun 2026**

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah dan merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun.



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
*Jalan Pelita Raya no. 305 G Telepon ( 0525 ) 21134, Faximille (0525 ) 23004*  
**BUNTOK 73711**

[www.bpkad.baritoselatankab.go.id](http://www.bpkad.baritoselatankab.go.id) Email : bpkad@baritoselatan.go.id

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH (SPD)**  
**KEPALA PERANGKAT DAERAH DENGAN BUPATI BARITO SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ALI SADIKIN. SE., MM**  
Jabatan : **Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

Selanjutnya disebut Pihak **PERTAMA**

Nama : **EDDY RAYA SAMSURI**  
Jabatan : **BUPATI BARITO SELATAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak **KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Buntok, 2 Januari 2026

**PIHAK KEDUA,**

**EDDY RAYA SAMSURI**

**PIHAK PERTAMA,**

**ALI SADIKIN. SE., MM**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19690505 200501 1 026

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN BARITO SELATAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.		Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	%	100
2.		Maturitas Penyelenggaraan sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	%	3,02
3.	Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	8,50
4.		Persentase Alokasi belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	40,00
5.	Meningkatkan tata Kelola Perbandaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	28,90
6.		Persentase Penurunan SILPA	%	6,05
7.	Meningkatkan tata Kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Laporan keuangan Tepat Waktu	%	100,00
8.	Meningkatkan tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	22,00

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	<b>57.838.343.640,06</b>	
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	<b>80.557.168.240,00</b>	
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	<b>2.081.422.900,00</b>	
<b>JUMLAH</b>		<b>140.476.934.780,06</b>	

Buntok, 2 Januari 2026

**PIHAK KEDUA,**

**EDDY RAYA SAMSURI**

**PIHAK PERTAMA,**

**ALI SADIKIN. SE., MM**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19690505 200501 1 026

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026 ini dibuat sebagai rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) yang diantaranya berisi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2006, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan diharapkan dapat terlaksana dan berjalan secara lebih terarah dalam mendukung Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.

Buntok, Januari 2026

Plt. KEPALA BADAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN BARITO SELATAN,



**ALI SADIKIN. SE., MM**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690505 200501 1 026

# Lampiran